

## BAB III

### ANALISA DATA

**A. Tingkat pengetahuan politik pemilih pemula, dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, meliputi:**

**1. Pengetahuan Tentang Negara**

Sebagai dasar Negara Pancasila yang digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia, segala sesuatu yang hubungannya dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wajib atau harus berdasarkan Pancasila. Hal ini artinya semua peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Maksud dari Pancasila Sebagai Dasar Negara yang artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah Negara. Ketetapan MPR NO. III/MPR/2000 menyatakan bahwa pancasila menurutnya yaitu "sebagai hukum dasar Nasional".<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan tentang Negara oleh beberapa responden mengatakan, "Indonesia adalah negara yang kaya akan alamnya. Tapi kekayaan ini tidak bisa diandalkan dengan baik dengan indonesia sendiri. Tapi malah negara lain yang mengandalkannya".<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ketetapan MPR NO. III/MPR/2000, tentang pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan siswa kelas XII, pada tanggal 20 Januari 2015

Indonesia menjadi negara makmur dan maju merupakan impian dari rakyat Indonesia. Negara bisa dikatakan makmur jika mempunyai banyak sektor pemasukan bagi kas negara untuk pembangunan. Pemasukan negara yang berlimpah juga akan bisa mensejahterakan rakyat. Semua hal itu bisa tercapai jika Indonesia melakukan inovasi dalam membangun negaranya. Pasal 33 UUD 1945 berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".<sup>33</sup> Hal ini seperti yang dikatakan oleh Miftahul mengatakan bahwa, "*Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak kebudayaan daerah, tetapi Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara yang maju*".<sup>34</sup>

Berdasarkan bangsa yang lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia.<sup>35</sup> Semboyan nasional Indonesia, "*Bhinneka tunggal ika*" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

## 2. Pengetahuan tentang partai politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

<sup>33</sup> Pasal 33 UUD 1945 tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan siswa kelas XI, pada tanggal 20 Januari 2015

<sup>35</sup> Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta; *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*; Institute of Southeast Asian Studies, 2003

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>36</sup> Menurut saya partai politik itu "*kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama*".<sup>37</sup> Menurut *Carl J. Friedrich* mendefinisikan Partai Politik sebagai berikut: Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materil.<sup>37</sup> dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pemahaman siswa akan partai politik masih kurang.

### 3. Pengetahuan tentang pemilu

Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif, eksekutif, dan kepala pemerintahan sebagaimana bunyi:

"Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", pasal 18 ayat (4). "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan ketua OSIS siswa kelas IX, pada tanggal 20 Januari 2015

<sup>37</sup>Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.

<sup>38</sup> Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 22E ayat (2)

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai pemilih khususnya pemilih pemula diperlukan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Menurut saya, "Pemilu merupakan singkatan dari Pemilihan Umum, sebuah sarana dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia".<sup>39</sup>

Menurut saya pemilu merupakan suatu wadah untuk menunjukkan aspirasi kita untuk menunjuk siapa yang paling pantas memimpin, oleh karena itu termasuk rugi kalo kita tidak ikut memilih (golput), bukan permasalahan siapa yang akan terpilih walau bagaimanapun dialah hasil akhir dan yang terbaik....mari kita ikut serta mensukseskan pemilu yang akan datang".<sup>39</sup> Dengan adanya sikap antusias dari pemilih pemula dalam kesadaran politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil, karena dengan kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan pengetahuan siswa dalam memahami pemilu sebagai pemilihan masih kurang.

#### 4. Pengetahuan tentang visi, misi dan program peserta pemilu

Dalam pemilihan umum selalu ada kampanye yang mengumbar banyak janji politik. Visi misi, dan segala sesuatu yang dapat menarik pemilih agar mempercayainya untuk duduk di kursi legislatif.

Mutiara mengatakan "*Saya tidak tahu apa itu visi, misi dan program peserta pemilu, yang saya tahu hanya pemilihan pemilu dilakukan satu*

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan wakil ketua OSIS siswa kelas XI, pada tanggal 21 november 2015

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan siswa kelas XI, pada tanggal 21 november 2015

*kali dalam 5 tahun, dan menurut saya terlalu banyak partai yang menawarkan iming-iming tapi tidak tahu maksud dan tujuannya.*"<sup>40</sup>

Kurangnya pengetahuan pemilih pemula tentang visi, misi dan program peserta pemilu, hal ini akan mengakibatkan menjadi salah satu faktor merosotnya kepercayaan masyarakat khususnya pemilih pemula untuk kembali memilih bakal calon anggota legislatifnya sehingga pemilih pemula lebih memilih menjadi Golput. Apabila sebagian pemilih pemula mengambil tindakan golput maka akan berdampak pada kurangnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu.<sup>41</sup> dari hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan tingkat pengetahuan siswa dalam memahami visi misi program peserta pemilu masih rendah bahkan tidak tahu sama sekali.

5. Pengetahuan tentang riwayat hidup calon dan partai politiknya

Masalah partisipasi politik yang sering muncul yaitu seperti seorang pemilih pemula bingung menentukan pilihan, ketidaktahuan mereka terhadap pemilu, ketidaktahuan mereka terhadap partai politik, visi misi partai politik, calon Gubernur dan Wakilnya, visi misi calon Gubernur dan Wakilnya, hal-hal itu yang dapat membuat seorang pemilih pemula melakukan Golput pada saat pemilihan. Seperti halnya AA mengatakan bahwa : *"saya benar-benar tidak tahu siapa dan partai apa*

---

<sup>40</sup>ibid

<sup>41</sup>peneliti

*yang akan saya pilih, karena memang saya tidak pernah mendengar informasi calon parpol sebelumnya”<sup>42</sup>*

6. Pengetahuan kesesuaian program yang ditawarkan calon dengan kebutuhan pemilih masyarakat

Pengetahuan tentang kesesuaian program merupakan suatu sikap mensukseskan kehidupan politik melalui kegiatan politik serta program-program pemerintah yang diselenggarakan untuk menunjang dan memberikan pengetahuan politik / pendidikan politik kepada masyarakat. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Dalam penelitian ini diberikan batasan terhadap keikutsertaan pemilih pemula dalam kehidupan politik yaitu dapat dilihat dari memberikan hak suaranya pada pemilu 2014 yang lalu ke tempat pemungutan suara, ikut dalam kampanye, dan ikut serta dalam kepengurusan partai politik. Seperti salah satu anggota Osis yang peneliti temui bahwa keikutsertaannya pada pemilu 2014 kemarin dia ikut

---

<sup>42</sup> ibid

berpartisipasi sebagai saksi pencatat suara pada saat pencoblosan berlangsung di sekolahnya.<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden diatas diketahui bahwa pemilih pemula di SMK SMSR Yogyakarta masih belum aktif dalam mengikuti kegiatan politik pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti salah satunya adalah kurangnya pengetahuan pemilih pemula terhadap pemilu itu sendiri. Disini juga dituntut peran aktif dari KPU sendiri untuk dapat mensosialisakannya kepada para pemilih pemula tersebut sehingga tercapai pemilihan yang demokratis dan objektif. Selain itu disini juga diminta keaktifan para pemilih pemula untuk dapat mencermati situasi dan dapat menambah pengetahuan mereka sendiri terhadap pemilu sehingga mereka sendiri tidak kecewa. Dalam hal ini pemilih pemula memang harus disiapkan untuk menjadi pemilih yang cerdas sehingga tidak bisa jatuh dalam eksploitasi politik. Saat dilakukan observasi di lingkungannya, maka diketahui bahwa sebagian besar pemilih pemula memilih untuk tidak terlalu memikirkan dampak ketika mereka salah memilih calon hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka terhadap Pemilu, dan tujuan dari Pemilu itu sendiri.

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan ketua OSIS siswa kelas XI, pada tanggal 21 Januari 2015

sebagai pemilih pemula terhadap proses pengambilan keputusan, dan (c) pengetahuan siswa sebagai pemilih pemula terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil; (3) faktor fisik individu dan lingkungan, sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum; dan (4) faktor nilai budaya yang merupakan basis yang membentuk demokrasi, menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Dalam pendekatan perilaku, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya dan akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul perilaku itu. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang. Klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, adalah (1) orientasi kognitif, yakni pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya, (2) orientasi afektif, yakni perasaan terhadap sistem politik, peranan, keberadaan aktor dan penampilannya, (3) orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Orientasi seseorang terhadap obyek-obyek politik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut. (1) Orientasi Positif, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik, (2) Orientasi Negatif,



yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang rendah, evaluasi dan perasaan negatif yang tinggi terhadap obyek politik, dan (3) Orientasi Netral, yaitu orientasi yang ditunjukkan oleh frekuensi ketidakpedulian yang tinggi atau memiliki tingkat orientasi yang sangat terbatas bahkan tidak memiliki orientasi sama sekali terhadap obyek-obyek politik. Orientasi politik pemilih pemula berdasarkan penelitian ini menunjukkan ke arah orientasi positif baik dalam orientasi kognitif, afektif maupun evaluatif. Hal ini menunjukkan orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan dan hasil penelitian pada bab terdahulu, maka peneliti menyimpulkan: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2014 adalah faktor pengaruh orang tua, faktor pilihan sendiri, faktor media massa, partai politik dan iklan politik, dan faktor teman sepergaulan, (2) faktor yang dominan yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan pemilu tahun 2014 adalah faktor pengaruh dari orangtua 16 siswa dan iklan media masa 8 siswa, (3) orientasi politik pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan pemilu tahun 2014 baik itu meliputi orientasi kognitif, afektif maupun evaluatif sudah mengarah pada tataran orientasi positif dimana orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.

Pemilih pemula Menurut lembaga-lembaga survey international seperti *the Pew Research Center* dan Gallup pemilih berusia antara 17 hingga 29 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pemilu 2014.<sup>43</sup>

Keikutsertaan pemilih pemula pada pemilihan kemudian akan menunjukkan perilaku mereka dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang pilpres. Dalam pembahasan akan diuraikan dua aspek pada penelitian ini. Pertama, Perilaku pemilih pemula di SMK SMSR Yogyakarta pada Pemilihan pemilu tahun 2014 yang lalu. Kedua, Kecenderungan perilaku pemilih pemula di SMK SMSR Yogyakarta dalam menjatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat pada pemilihan pemilu tahun 2014. Berikut akan diuraikan lebih lanjut.

Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*,<sup>45</sup> menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Merujuk pada hasil studi serta pendekatan-pendekatan di atas, penelitian skripsi ini mencoba menggambarkan dan menganalisis

---

<sup>43</sup> UU Pilpres 2008: 7

<sup>45</sup> Denis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour* (London: Allen and Unwin, 1983)

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pemula. Ketiga pendekatan ini akan diuraikan lebih lanjut.

Perilaku pemilih pemula di SMK SMSR Yogyakarta dalam menentukan atau menjatuhkan pilihannya pada pemilu 2014 umumnya karena faktor sosiologis. Hal demikian karena hampir semua responden yang diteliti dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat sama dengan pilihan orang tuanya. Dimana Menurut penulis, pilihan pemilih pemula tersebut dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. Berikut jawaban mereka ketika ditanya terkait bagaimana mereka memberikan suara dan menjatuhkan pilihannya pada saat pemilihan. Pernyataan kemudian diutarakan oleh beberapa responden, salah satu dari mereka Mulismayani, menyatakan: *“Pada pemilu 2014 lalu saya memberikan suara dan menjatuhkan pilihan saya kepada kandidat tersebut karena orang tua juga demikian”*<sup>46</sup>

Tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh Risma, sebagai berikut: *“Semua keluarga saya memilih kandidat itu, Makanya saya secara pribadi ikut memilih beliau”*<sup>47</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas yang di kemukakan oleh Mulismayani dan Risma menunjukkan perilaku yang ikut-ikutan. Perilaku ikut-ikutan demikian disebabkan karena mereka tidak mampu dan melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka. Selain itu, keputusan politik mereka masih belum bulat menyebabkan pilihan politik mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan pengelompokan sosial yang terbentuk di

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan ketua Osis, 17 tahun, pada 22 Januari 2015

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan wakil ketua Osis, 17 tahun, pada 22 Januari 2015

tempat tinggal mereka, khusus di dalam keluarga dan orangtua. Menurut mereka orang tua lebih tahu mana yang terbaik dan benar dan informasi yang didapatkan cukup terbatas. Hal demikian lebih lanjut diutarakan oleh Mulismayani bahwa:

*"Hanya beberapa calon yang saya ketahui, itupun tidak tahu secara mendalam sehingga tidak melihat secara keseluruhan mana yang berpotensi dan baik untuk saya pilih sebagai pemimpin".<sup>48</sup>*

Pernyataan di atas jelas bahwa pemilih pemula tidak tersentuh atau mendapatkan pendidikan politik bagaimana memilih pemimpin yang cocok dengan mereka. Selain itu perilaku ikut-ikutan demikian juga diakibatkan karena kurangnya mental pemilih pemula untuk menentukan pilihan mereka juga belum tahu bagaimana memilih pemimpin yang tepat. Meskipun demikian, perilaku tersebut menunjukkan Adanya preferensi pilihan yang sama dengan preferensi pilihan orangtuanya.

Hal ini sejalan dalam pendekatan sosiologis yang melihat hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Menurut Pomper<sup>49</sup> predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dsb. Namun, Perilaku demikian

---

<sup>48</sup> Idem

<sup>49</sup> Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. 2012. Bandung: Alfabeta

tidak lepas dari isu yang didapatkan oleh seorang anak lebih banyak berasal di dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak. Waktu yang mereka gunakan di lingkungan keluarga juga lebih banyak dibandingkan di lingkungan sekolah dan teman sebaya. Hal demikian menyebabkan akses komunikasi yg diterima di lingkungan keluarga lebih mudah.

Selain dari penjelasan Gerald Pomper di atas, David Apter<sup>39</sup> menguraikan tentang pengaruh dari keluarga terhadap anak dalam memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan orangtuanya. Bahwa, “adanya kesejajaran atau kesamaan pilihan antara orangtua dengan anaknya merupakan suatu yang wajar. Sebab pada lembaga keluarga itulah seseorang pertama kali mempunyai akses pembentukan identitas diri, mempelajari nilai-nilai lingkungan dan sosial mereka, termasuk peran politiknya. Pada proses paling dini, pembentukan sikap-termasuk pembentukan sikap politik anak-pertama kali di lingkungan keluarga. fase ini merupakan fase belajar keluarga. pada fase ini anak-anak pertama kali mulai belajar dari orangtuanya tentang perasaan orangtua mereka terhadap pemimpin politik, perasaan orangtua mereka terhadap isu-isu politik dsb.” Pendek kata, bagi Mark N. Franklin<sup>50</sup>, ikatan-ikatan sosilogis semacam ini sampai sekarang secara teoritis masih berkaitan untuk melihat perilaku memilih seseorang.

---

<sup>39</sup> Ibid hal: 495

<sup>50</sup> Ibid

Sejalan dengan itu, dalam penelitian ini tidak banyak diantara pemilih pemula yang preferensi pilihannya sama dengan orang tuanya karena faktor ikut-ikutan tapi juga karena mendapat arahan/desakan dari orang tuanya. Mereka ikut berpartisipasi itu karena arahan/desakan orangtua untuk memilih calon-calon kandidat yang sama dengan orangtuanya. Seperti yang diutarakan oleh Udin, menyatakan bahwa: *"sebenarnya saya tidak tahu menahu dan tidak ingin terlibat atau berpartisipasi dalam pemilu 2014 namun karena orang tua mengajak untuk memilih kandidat yang mereka pilih maka saya ikut saja"*.<sup>51</sup> Tidak berbeda dengan yang diutarakan Nirwana, menyatakan bahwa: *"saya kemarin sudah memperoleh kartu pemilih, jadi sebuah kewajiban bagi saya untuk memilih. Meskipun saya tidak faham apa itu pemilu dan pilkada. Tapi orangtua saya menyuruh untuk memilih seorang pilihan yang sama"*.<sup>52</sup>

Dari petikan pernyataan di atas yang di utarakan Udin bahwa mereka diarahkan oleh orang tuanya kerena tidak tahu-menahu menunjukkan karena mereka kurang paham atau mengetahui isu politik. Model perilaku ini tidak banyak yang dialami oleh seorang anak terhadap orang tuanya karena dengan sendirinya mereka akan senangtiasa dan membenarkan apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Dalam hal ini perilaku pemilih pemula ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. Perilaku demikian merupakan partisipasi yang

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Udin, 18 tahun, siswa kelas XI, pada 22 Januari 2015

<sup>52</sup> Idem

dimobilisasi. Menurut Huntington dan Nelson<sup>53</sup> mengenai partisipasi mobilisasi adalah partisipasi yang lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain sangat berkaitan terhadap partisipasi individu atau kelompok. Namun, Perilaku orang tua yang demikian biasa menyebabkan sang anak tidak memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin yang tepat didaerahnya.

Menurut penulis, perilaku pemilih pemula pada siswa di SMK SMSR Yogyakarta ini mudah diintimidasi, khususnya dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih labil. Dalam penelitian ini, orangtua sebagai lingkungan sosial terdekat sangat mempengaruhi pilihan seorang anak. Dimana dalam lingkungan keluarga terjadi proses sosialisasi. Dari proses sosialisasi kemudian Pemilih pemula menyerap informasi berupa isu-isu tema dan kandidat lebih dominan daripada lingkungan sekolah, teman sebaya, dll. Lebih lanjut menurut penulis, bahwa adanya pemilih pemula yang yang tidak banyak tahu keikutsertaan dan dalam menjatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat menunjukkan tipe Apatis mereka. tipe ini menunjukkan perilaku acuh tidak acuh di kalangan pemilih, khususnya pemilih pemula yang dilatar belakangi karena persepsi tidak pentingnya mereka ikut berpartisipasi dalam pemilu. Akibatnya mereka kurang terlibat dalam pemilihan seperti menjadi tim sukses atau menjadi anggota partai politik. Selain itu pula tidak mengikuti perkembangan informasi dan isu-isu politik yang terjadi.

---

<sup>53</sup>Makalah-tentang-partisipasi-politik.html (<http://udin-note.blogspot.com/2013/09/> diakses pada januari 2015)

Pada penelitian ini, menemukan bahwa yang mempengaruhi keputusan seorang pemilih, khususnya pemilih pemula yakni lingkungan tempat tinggal mereka yang tidak lain adalah lingkungan keluarga. Seperti dalam Dasar model penjelasan mikrososiologis berasal dari teori lingkaran sosial yang diformulasikan oleh Georg Simmel (1890)<sup>54</sup> pada akhir abad lalu. Menurut teori ini, setiap manusia terikat dalam beberapa lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal dsb. Akibatnya, preferensi politik atau kesamaan pilihan dalam lingkungan keluarga lazim terjadi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tingginya preferensi politik atau kesamaan tersebut terhadap pemilih pemula pada siswa di SMK SMSR Yogyakarta pada pemilu 2014, adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang cukup terbatas, informasi berupa isu-isu tema, pada pemilu 2014 pertukaran informasi tidak terjadi secara umum, tidak terjadi secara umum dalam hal ini maksudnya sulitnya akses informasi di lingkungan masyarakat yakni tidak ada media informasi yang tersedia. Pertukaran informasi terkait partai politik, isu-isu tema, dan kandidat hanya terjadi dari satu individu ke individu yang lain. Pertukaran informasi atau juga disebut dengan proses sosialisasi paling mudah terjadi di lingkungan keluarga. Mengingat bahwa keluarga adalah kelompok terkecil dalam suatu masyarakat dan setiap saat kita berkomunikasi dengan mereka, akibatnya informasi banyak dan mudah diserap. Sebagaimana yang diutarakan Responden Nur Syam menyatakan: *"saya memperoleh informasi tentang pemilu 2014 serta calon kandidat yang*

---

<sup>54</sup>ibid, hal 493



*berkompetisi saat itu hanya dari lingkungan keluarga khususnya orangtua saya, selain itu di tetangga saja.*"<sup>55</sup>

Berikut jawaban responden lain dengan pertanyaan yang sama, yaitu Ahmad menyatakan: "*pada pemilu 2014 lalu informasi yang saya dapatkan dari orangtua saya dan di radio kadang-kadang kalau sedang keluar daerah*"<sup>56</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, informasi mengenai calon kandidat mereka dapat seadanya, terlebih daripada itu mereka tidak memiliki keinginan untuk mencari informasi yang lebih mengenai calon tersebut. Menurut penulis, para pemilih pemula memang menyerap informasi tapi mereka tidak mencari dan mengolah informasi dengan aktif mereka mendapat informasi sebagai produk sampingan dari berbagai aktivitas sehari-hari. Terjadinya hal demikian karena mereka tidak memperoleh informasi yang cukup. Mereka tidak mampu untuk memeriksa akurasi informasi yang yang cukup. Fenomena inilah yang dipostulatkan Popkin sebagai hukum *Law information rationality* (rasionalitas berdasarkan informasi terbatas) atau *gut rationally* (logika perut).<sup>57</sup> Informasi mengenai pemilu 2014 sendiri banyak diperoleh dari orangtuanya dan radio yang memberitakan pelaksanaan pemilu 2014.

Namun, informasi dari orangtua lah yang paling berpengaruh pada Pemilih pemula tersebut. Karena kegiatan sehari-hari banyak terjadi di

---

<sup>55</sup> Idem

<sup>56</sup> Idem

<sup>57</sup> Ibid, hal 519

lingkungan keluarga, menyebabkan akses komunikasi yg diterima di lingkungan keluarga lebih mudah. Dapat dikatakan bahwa rasionalitas pada pemilih pemula tidak lepas dari informasi yang didapatkan di lingkungan keluarganya. Penulis menarik kesimpulan bahwa alasan rasional diuraikan di atas berkaitan dengan adanya pengaruh sosiologis dikalangan pemilih pemula pada penelitian ini. Dimana pilihan pemilih pemula dipengaruhi oleh informasi yang diserap di lingkungan keluarganya dan menyebabkan preferensi pilihan pemilih pemula sama dengan orangtua mereka.

Ketidak mampuan pemilih dalam menetapkan pilihan yang cocok. Hal ini disebabkan karena pemilih pemula pada siswa di SMK SMSR Yogyakarta tidak tersentuh atau mendapat pendidikan politik yang cukup sejak dini, khususnya dalam bagaimana menentukan kandidat yang tepat dan cocok dengan mereka. Akibatnya, mereka mudah diintimidasi, Partisipasi yang diintimidasi Menurut Huntington dan Nelson<sup>76</sup> mengenai partisipasi mobilisasi adalah partisipasi yang lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain rentang terjadi sekalipun itu berasal dari lingkungan keluarga. hal tersebut sangat berkaitan terhadap partisipasi individu atau kelompok. Namun, Perilaku orang tua yang demikian biasa menyebabkan sang anak tidak memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin yang tepat didaerahnya. Menurut penulis, perilaku pemilih pemula di SMK SMSR Yogyakarta ini mudah diintimidasi, khususnya

dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih labil.

3. Faktor sikap Apatis pemilih. Prefensi politik atau kesamaan pilihan di lingkungan keluarga juga disebabkan karena adanya sikap Apatis pemilih. Apatis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sikap Acuh tidak acuh, tidak peduli, atau masa bodoh. Apatis adalah sikap yang menolak dengan tegas keterlibatan pemilih pemula terjun dalam politik praktis semisal menjadi tim sukses. Namun tidak secara ekstrim menolak untuk tidak berpartisipasi, khususnya pada pemilu 2014. Bagi pemilih Apatis, keterlibatan atau partisipasi politik pemilih cukup diwujudkan dalam bentuk memilih kandidat yang ada untuk menjaga netralitas serta idealismenya. Hal itu sejalan dengan hasil wawancara dengan Udin, menyatakan : *"sebenarnya saya tidak tahu-menahu dan tidak ingin terlibat atau berpartisipasi dalam pemilu 2014 namun karena orangtua mengajak untuk memilih kandidat mereka maka saya ikut memilih"*.<sup>58</sup>

Pernyataan di atas bahwa mereka sebenarnya tidak ingin terlibat atau berpartisipasi, jelas menunjukkan sikap Apatis pemilih pemula terhadap pentingnya memberikan suara dalam pemilihan sebagai warga Negara. Udin juga mengutarakan tidak tahu menahu dengan perkembangan isu politik yang terjadi selama pemilu 2014 berlangsung. Namun, ia tetap berpartisipasi sebagai wujud netralitasnya dalam lingkungan keluarga.

4. Kepatuhan anak terhadap orangtua. Kepatuhan anak terhadap orangtua lazim terjadi pada masyarakat pedesaan. Dimana daerah pedesaan

---

<sup>58</sup> Idem

merupakan daerah yang dalam lingkaran sosial memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu. Norma tersebut menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tenang tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya, sekalipun dalam lingkungan keluarga. Sama halnya dengan kepatuhan anak terhadap orangtua mereka. Pada faktor ini, seorang anak akan meyakini apapun keputusan dan pilihan dari orangtua mereka. Begitupun dalam hal menetapkan atau mejatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat pada pemilihan. Pada pemilu 2014 pada siswa di SMK SMSR Yogyakarta faktor ini juga melatar belakangi perilaku pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya terhadap seorang kandidat, hal tersebut sejalan dengan Paul F. Lazarsfeld<sup>59</sup> menerangkan cara pikir ini kepada pemilih. Setiap pemilih hidup dalam konteks tertentu: status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya, dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya tersendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi. Namun, konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tenang, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.

Ke empat faktor yang diuraikan di atas adalah faktor yang melatar belakangi tingginya preferensi politik atau kesamaan pilihan pemilih

---

<sup>59</sup> Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. 2012. Bandung: Alfabeta hal : 493

pemula di SMK SMSR Yogyakarta pada Pemilu 2014. Hal demikian karena pada umumnya dan hampir semua responden yang diwawancarai menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat karena pengaruh orangtua. Jadi peran dari orang tua dalam hal ini sangat menentukan perilaku seorang anak, terkhusus dalam dunia politik. Bagi pemilih pemula dunia politik merupakan dunia yang syarat dengan kepentingan-kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka penulis menyimpulkan, adanya pengaruh dalam lingkungan keluarga mengancam kebebasan memilih pada anak sebagai pemilih pemula. Sehingga tidak mencerminkan partisipasi yang otonom, pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.